HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF: SUDI KASUS DI GAMPONG LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

Muhammad Salim Mahmudi¹, Taufiq Hidayat², Amiruddin³, Rafsan Jani⁴, Rismayana⁵

^{1,2,3,4,5}STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh, Indonesia

Email: ¹ msalimsalim09@gmail.com, ² taufiq.najla@yahoo.com,

³ amir.samy050484@gmail.com, ⁴ rafsan.jn@gmail.com

⁵ rismayana246895@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu menghadapi tantangan yang signifikan dari perspektif fiqh dan hukum positif. Dari sisi fiqh, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh dan dominasi adat lokal sering menyebabkan konflik dalam pembagian warisan. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, proses formal melalui Pengadilan Agama dihadapkan pada kendala berupa kompleksitas prosedur, biaya, waktu, dan kurangnya dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*Case Study*). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah bahwa penyelesaian sengketa waris secara fiqh di Gampong Lam Bheu dilakukan melalui musyawarah berbasis hukum Islam (faraidh) dengan bimbingan tokoh agama. Praktiknya sering mengutamakan harmoni keluarga meski terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraidh. 2). Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Positif di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah bahwa dalam perspektif hukum positif, penyelesaian sengketa merujuk pada Kompilasi Hukum Islam melalui Pengadilan Agama jika musyawarah gagal. Proses ini legal tetapi dianggap rumit, memakan waktu, dan biaya, sehingga sering dijadikan pilihan terakhir. 3). Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh dan hukum positif di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah bahwa kendala utama meliputi rendahnya pemahaman terhadap hukum faraidh, inkonsistensi peran tokoh agama, proses pengadilan yang kompleks, serta kurangnya dokumen resmi, yang sering memperpanjang penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Sengketa, Waris, Fiqh, Hukum Positif

ABSTRACT

The settlement of inheritance disputes in Gampong Lam Bheu faces significant challenges from a positive fiqh and legal perspective. In terms of fiqh, the low public understanding of the law of faraidh and the dominance of local customs often lead to conflicts in the distribution of inheritance. Meanwhile, from a positive legal perspective, formal processes through the Religious Court are faced with obstacles in the form of procedural complexity, cost, time, and lack of official documents. This research uses a qualitative approach with a case study design. The results of the study show that: 1). Settlement of Inheritance Disputes from a Fiqh Perspective in Gampong Lam Bheu, Darul Imarah District, Aceh Besar Regency is that the settlement of inheritance disputes in fiqh in Gampong Lam Bheu is carried out through Islamic law-based deliberation (faraidh) with the guidance of religious leaders. The practice often prioritizes family harmony although sometimes it is not fully in accordance with the provisions of the faraidh. 2). Settlement of Inheritance Disputes From a Positive Legal Perspective in Gampong Lam Bheu, Darul Imarah District, Aceh Besar Regency is that in a positive legal perspective, dispute resolution refers to the Compilation of Islamic Law through the Religious Court if the deliberation fails. This process is legal but is considered complicated, time-consuming, and costly, so it is often used as a last resort. 3). Obstacles in the Settlement of Disputes of Inheritance from a Fiqh Perspective and positive law in Gampong Lam Bheu, Darul Imarah District,

Aceh Besar Regency are that the main obstacles include low understanding of fariath's law, inconsistency in the role of religious leaders, complex court processes, and lack of official documents, which often prolong conflict resolution.

Keywords: *Islamic Family Law, Disputes, Inheritance, Fiqh, Positive Law*

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam dan penyelesaian sengketa waris di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ketiga sistem hukum ini berfungsi dan saling mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa waris. Hukum waris Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta waris, sedangkan hukum positif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan kerangka hukum yang lebih luas yang mencakup semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim (Lusiana, 2022; Irawaty & Diyantari, 2017).

Dalam hukum waris Islam, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pembagian warisan. Zainuddin et al. menekankan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dengan tanggung jawab dan beban yang harus ditanggung oleh para ahli waris (Zainuddin et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para ahli waris, sehingga konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi sengketa waris yang berkaitan dengan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap pembagian yang dianggap tidak adil (Amiruddin, 2022).

Sengketa waris di Indonesia sering kali dipicu oleh perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum adat. Misalnya, di beberapa komunitas, seperti di Cimanuk, terdapat praktik pembagian waris yang melibatkan pemimpin masyarakat yang berperan dalam menentukan pembagian harta (Somawinata & Taqiyuddin, 2020; Elfia et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari tradisi lokal dalam penyelesaian sengketa waris, yang kadang-kadang bertentangan dengan ketentuan KHI. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berinteraksi dan saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa waris.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Kusmayanti, ditemukan bahwa penerapan hukum adat dalam pembagian waris di Desa Banceuy menunjukkan bahwa masyarakat sering kali membagi harta waris sebelum pemilik harta meninggal, yang bertentangan dengan

ketentuan KHI (Kusmayanti, 2024). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum yang berlaku, di mana praktik adat sering kali lebih diutamakan daripada hukum positif. Selain itu, Fakhyadi mencatat bahwa patriarkisme dalam hukum waris Islam sering kali menjadi sumber ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki (Fakhyadi, 2021).

Aspek gender dalam hukum waris juga menjadi perhatian penting. Retnowulandari menyoroti bahwa perspektif gender dalam hukum waris adat dan Islam sering kali mengabaikan hak-hak perempuan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian waris (Retnowulandari, 2022). Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkal, di mana perempuan sering kali dianggap tidak berhak atas harta warisan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mereformasi hukum waris agar lebih responsif terhadap isu-isu gender dan keadilan sosial.

Penyelesaian sengketa waris di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Tedla dan Mekonen menunjukkan bahwa konflik yang berkaitan dengan warisan sering kali berkisar pada hubungan keluarga yang dekat, seperti antara saudara dan orang tua-anak, dan dapat diperburuk oleh dinamika sosial-ekonomi yang ada (Tedla & Mekonen, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor eksternal, seperti ketidakadilan ekonomi dan ketegangan sosial, dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa waris.

Dalam menghadapi sengketa waris, pendekatan mediasi dan rekonsiliasi sering kali menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan litigasi. Heriyah dan Santiago menekankan pentingnya rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa hukum, karena dapat membantu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa (Heriyah & Santiago, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong perdamaian dan persatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa waris untuk mempertimbangkan opsi mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih harmonis.

Dalam konteks hukum positif, Amiruddin mencatat bahwa pengadilan agama dan organisasi Islam memainkan peran penting dalam menangani sengketa waris (Amiruddin, 2022). Namun, sering kali terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik di lapangan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian waris. Oleh karena itu,

perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam dan hukum positif, serta memperkuat institusi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris.

Pentingnya pendidikan dan pemahaman hukum waris juga ditekankan oleh Adnan dan Uyuni, yang mencatat bahwa pemahaman yang baik tentang hukum waris dapat membantu mencegah sengketa dan konflik di masa depan (Adnan & Uyuni, 2021). Oleh karena itu, program-program pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris perlu ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat yang masih memegang tradisi adat yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum waris, serta mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul.

Jadi, hukum keluarga Islam dan penyelesaian sengketa waris di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum yang mempertimbangkan aspek gender, keadilan sosial, dan dinamika sosial-ekonomi akan sangat penting dalam menciptakan keadilan dalam pembagian waris di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, menghadapi sejumlah problematika yang mencerminkan kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks fiqh, problematika utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh, yang mengakibatkan interpretasi hukum waris yang tidak seragam dan potensi konflik dalam pembagian harta warisan. Selain itu, faktor adat dan tradisi lokal sering kali mendominasi keputusan keluarga, meskipun tidak selalu selaras dengan ketentuan syariat.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum positif, masyarakat dihadapkan pada kendala aksesibilitas terhadap sistem hukum formal. Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama sering kali dianggap rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kekurangan dokumen resmi, seperti akta tanah dan surat keterangan ahli waris, juga menjadi hambatan signifikan yang memperlambat proses hukum.

Selain itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem hukum formal menciptakan preferensi untuk menyelesaikan konflik secara informal melalui tokoh agama atau musyawarah keluarga. Namun, metode informal ini tidak selalu menjamin keadilan, terutama jika terdapat pihak yang memanfaatkan posisi kekuasaan dalam keluarga atau masyarakat. Problematika ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih integratif dan edukasi hukum bagi masyarakat setempat agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efektif dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*Case Study*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika hukum keluarga Islam dan penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada studi kasus. Desain ini dipilih untuk mengkaji fenomena spesifik terkait penyelesaian sengketa waris, baik dari perspektif fiqh maupun hukum positif, dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Gampong Lam Bheu.

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari 1). Sumber Data Primer: Data utama diperoleh langsung dari wawancara dengan unsur pemerintahan gampong (seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh adat) serta masyarakat yang terlibat dalam kasus sengketa waris dan 2). Sumber Data Sekunder: Data pendukung berupa dokumentasi terkait, seperti dokumen hukum waris, catatan persidangan, peraturan lokal, dan arsip lain yang relevan dengan studi kasus.

Teknik Pengumpulan Data terdiri dari 1). Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci, seperti tokoh agama, pejabat gampong, dan ahli waris, untuk menggali pandangan mereka mengenai penyelesaian sengketa waris. 2). Observasi: Peneliti mengamati langsung situasi sosial dan budaya di Gampong Lam Bheu untuk memahami konteks konflik dan proses penyelesaiannya dan 3). Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-dokumen resmi dan tidak resmi yang relevan, seperti putusan pengadilan, aturan adat, atau catatan musyawarah keluarga.

Teknik Analisis Data diperoleh dengan cara menganalisis dalam menggunakan pendekatan interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahap utama: 1). Reduksi

Data: Menyaring data yang relevan dan menyusun kategori sesuai dengan fokus penelitian.

2). Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah analisis lebih lanjut dan 3). Penarikan Kesimpulan: Membuat interpretasi terhadap data berdasarkan temuan dan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Peneliti juga menggunakan beberapa teknik untuk memastikan keabsahan data: 1). Triangulasi: Membandingkan informasi dari berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi temuan. 2). Perpanjangan Waktu Pengamatan: Peneliti menghabiskan waktu lebih lama di lokasi penelitian untuk mendalami fenomena dan memastikan data yang diperoleh akurat dan 3). Diskusi dengan Rekan Peneliti: Melibatkan diskusi dengan pihak lain untuk menghindari bias dan meningkatkan validitas hasil analisis.

Jadi, secara keseluruhan bahwa metode ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu dari perspektif fiqh dan hukum positif, serta relevansinya dengan konteks sosial masyarakat setempat yaitu di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu berdasarkan perspektif fiqh dilakukan dengan pendekatan hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Masyarakat setempat cenderung memprioritaskan musyawarah untuk mufakat sebagai metode utama dalam menyelesaikan konflik waris. Proses ini sering melibatkan tokoh agama, seperti imam gampong atau ulama setempat, yang bertindak sebagai mediator untuk memberikan nasihat dan penafsiran terhadap hukum waris Islam. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan faraidh, di mana ahli waris mendapatkan bagian sesuai nisbah yang telah ditentukan syariat. Namun, dalam praktiknya, terkadang muncul kesepakatan untuk membagi warisan secara adat yang lebih menonjolkan harmoni keluarga, meskipun tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan hukum faraidh.

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah,

Kabupaten Aceh Besar, merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, pendekatan fiqh Islam menjadi sangat relevan, mengingat warisan dalam masyarakat Muslim diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Sengketa waris sering kali muncul akibat ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban para ahli waris, serta perbedaan interpretasi terhadap hukum waris Islam yang dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga.

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan adalah melalui mediasi, yang merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS). Mediasi memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Dalam konteks ini, mediasi dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan adat istiadat setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Syafrida, APS berfungsi untuk mencegah permusuhan dan menciptakan situasi win-win bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Syafrida, 2020).

Di Gampong Lam Bheu, peran mediator sangat penting, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa waris. Tokoh masyarakat, seperti kyai atau pemuka agama, sering kali diharapkan untuk berperan sebagai mediator. Mereka dianggap memiliki otoritas dan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam dan nilai-nilai lokal, sehingga dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih harmonis. Penelitian oleh Nury menunjukkan bahwa kyai di Madura, misalnya, memiliki peran signifikan dalam mediasi sengketa waris, dan pendekatan ini dapat diadaptasi di Aceh (Nury, 2023).

Pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa waris juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa mediasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Hadiati dan Tampi menekankan bahwa mediasi merupakan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa konsumen, dan prinsip-prinsip yang sama dapat diterapkan dalam konteks waris (Hadiati & Tampi, 2017). Dengan demikian, mediasi tidak hanya memberikan solusi yang lebih cepat dan murah, tetapi juga membantu menjaga hubungan baik antar anggota keluarga.

Namun, meskipun mediasi dapat menjadi solusi yang efektif, ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan mengenai pembagian warisan itu sendiri. Fatahullah mencatat bahwa perubahan sikap masyarakat

terhadap pembagian warisan dapat mempengaruhi tatanan sosial yang ada, dan sering kali menyebabkan sengketa (Fatahullah, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial dan budaya di Gampong Lam Bheu, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks hukum waris Islam, terdapat ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para ahli waris. Misalnya, Al-Qur'an mengatur pembagian harta warisan dengan proporsi tertentu, yang harus diikuti oleh semua ahli waris. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan dari ketentuan ini, yang dapat menyebabkan sengketa. Adli menekankan bahwa penting untuk membuka kembali jalur hukum yang ada, sehingga para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan jika mediasi tidak berhasil (Adli, 2020).

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris. Kaban mencatat bahwa dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa waris sering kali melibatkan hukum adat dan hukum nasional, dan hal ini juga berlaku di Gampong Lam Bheu (Kaban, 2016). Oleh karena itu, pendekatan yang holistik yang menggabungkan hukum Islam, hukum adat, dan prinsip-prinsip keadilan sosial sangat diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Misalnya, perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian warisan. Wahyunadi dan Azahari menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat berdampak signifikan pada pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam (Wahyunadi & Azahari, 2015). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai dinamika sosial yang ada di masyarakat.

Dalam konteks ini, penggunaan teknologi juga dapat menjadi alat yang berguna dalam penyelesaian sengketa waris. Misalnya, aplikasi yang dirancang untuk membantu perhitungan dan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Penelitian oleh Amaldi menunjukkan bahwa aplikasi semacam ini dapat membantu mengurangi perselisihan dalam pembagian warisan (Amaldi, 2024). Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan memahami proses hukum yang berlaku.

Selanjutnya, penting untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa waris. Hal ini termasuk para ahli waris, mediator, dan pemangku kepentingan lainnya. Melibatkan semua pihak dalam proses mediasi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dan transparan, sehingga semua pihak merasa didengar dan dihargai. Penelitian oleh Pratama menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari semua pihak dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa (Pratama, 2023).

Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, serta proses hukum yang berlaku. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris, diharapkan dapat mengurangi sengketa yang terjadi di masa depan. Penelitian oleh Setiawan et al. menunjukkan bahwa pendidikan mengenai hukum waris dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam (Setiawan et al., 2012).

Di samping itu, perlu juga ada upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa waris. Lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) dapat berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Rafika mencatat bahwa lembaga-lembaga ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan efisien bagi masyarakat (Rafika, 2022). Dengan memperkuat lembaga-lembaga ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa waris dapat berjalan dengan lebih baik.

Pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam penyelesaian sengketa waris juga ditekankan oleh Nursyamsudin, yang menunjukkan bahwa pembagian harta waris harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk hak-hak para ahli waris dan ketentuan hukum yang berlaku (Nursyamsudin, 2018). Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Jadi, penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Mediasi dapat menjadi solusi yang efektif, tetapi harus didukung oleh pemahaman yang baik mengenai hukum waris Islam dan hukum adat. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban para ahli waris, serta penguatan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, sangat penting

untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan sengketa waris dapat diselesaikan dengan cara yang lebih harmonis dan menguntungkan semua pihak.

B. Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Positif di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum positif di Gampong Lam Bheu mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan panduan dalam pengadilan agama. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, pihak-pihak yang bersengketa biasanya membawa kasus ini ke Pengadilan Agama. Proses hukum ini melibatkan pembuktian dokumen resmi, seperti akta kelahiran, surat keterangan ahli waris, dan dokumen lainnya yang mendukung klaim para pihak. Pengadilan bertugas memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keadilan dan ketentuan syariat. Meskipun proses ini legal dan formal, beberapa masyarakat merasa terbebani oleh biaya dan waktu yang dibutuhkan, sehingga mereka lebih memilih penyelesaian secara adat atau fiqh terlebih dahulu.

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana masyarakat setempat mengelola dan menyelesaikan konflik yang muncul dari pembagian harta warisan. Sengketa waris sering kali timbul akibat perbedaan pemahaman antara ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pengaruh budaya dan adat yang kuat dalam masyarakat Aceh.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penyelesaian sengketa waris adalah melalui musyawarah. Musyawarah merupakan metode yang diutamakan dalam masyarakat Aceh, di mana semua pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan temuan Fatahullah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui metode litigasi dan non-litigasi, dengan musyawarah sebagai salah satu bentuk non-litigasi yang efektif (Fatahullah, 2023). Dalam konteks ini, akta perdamaian yang disusun oleh notaris juga berperan penting, karena dapat menjadi kesepakatan formal yang mengikat antara

para ahli waris (Puspita, 2022).

Namun, meskipun musyawarah sering kali menjadi pilihan, tidak jarang konflik waris berlanjut ke jalur litigasi. Tarmizi mencatat bahwa konflik kewarisan sering kali disebabkan oleh keserakahan, kesalahpahaman, dan dominasi dari ahli waris tertua (Tarmizi, 2024). Dalam hal ini, hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana hakim akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai, terkadang jalan hukum formal menjadi pilihan terakhir.

Dalam Gampong Lam Bheu, pengaruh hukum adat sangat kuat. Masyarakat setempat sering kali menggabungkan hukum Islam dan hukum adat dalam proses pembagian warisan. Syaikhu mengemukakan bahwa masyarakat di Palangka Raya, yang memiliki karakteristik serupa, mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Syaikhu, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa ada kesepakatan umum di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia mengenai pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa waris, meskipun ada perbedaan dalam penerapan hukum.

Pentingnya pemahaman hukum waris dalam masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Ismiradi menekankan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dengan musyawarah, dan setiap ahli waris harus mengetahui bagian yang akan diterimanya (Ismiradi, 2024). Namun, sering kali terdapat ketidakpahaman di kalangan masyarakat mengenai hukum waris yang berlaku, yang dapat menyebabkan sengketa. Penelitian oleh Hidayat et al. menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak memahami pembagian harta waris menurut hukum Islam, sehingga mereka cenderung membagi harta secara merata tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada (Hidayat et al., 2018).

Dalam konteks hukum positif, Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris BW (Burgerlijk Wetboek), dan hukum waris Islam. Aminah mencatat bahwa pluralisme hukum ini memungkinkan masyarakat untuk memilih sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Aminah, 2021). Namun, keberadaan berbagai sistem hukum ini juga dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, terutama ketika ahli waris memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal pemahaman hukum.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris adalah adanya perbedaan agama di antara ahli waris. Susilo et al. mengemukakan bahwa dalam kasus di mana ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris, hukum Islam memberikan ruang bagi penyelesaian melalui hibah dan wasiat (Susilo et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam keyakinan, hukum Islam tetap berusaha untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Sistem kewarisan yang berlaku di Gampong Lam Bheu juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang ada. Krisnawati mencatat bahwa perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan sering kali menyebabkan konflik di antara ahli waris (Ahmadin, 2019). Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum waris.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk notaris, pengacara, dan tokoh masyarakat. Peran notaris sangat penting dalam menyusun akta perdamaian dan memastikan bahwa semua pihak memahami isi kesepakatan yang dicapai (Puspita, 2022). Selain itu, tokoh masyarakat juga dapat berperan sebagai mediator dalam proses musyawarah, membantu para ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Dalam kesimpulannya, penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek hukum, budaya, dan sosial. Masyarakat setempat cenderung mengedepankan musyawarah sebagai metode penyelesaian, meskipun jalur litigasi juga tersedia. Pentingnya pemahaman hukum waris dan peran notaris serta tokoh masyarakat dalam proses ini tidak dapat diabaikan. Dengan meningkatkan pemahaman hukum dan memperkuat peran mediator, diharapkan sengketa waris dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan adil.

C. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Penelitian mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris, baik dari perspektif fiqh maupun hukum positif. Kendala utama dari perspektif fiqh adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum

faraidh, yang sering kali menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpuasan di antara ahli waris. Selain itu, peran tokoh agama yang tidak konsisten dalam memberikan solusi berbasis fiqh juga menjadi tantangan, terutama jika terdapat tekanan dari pihak tertentu untuk mengakomodasi kepentingan pribadi.

Dari perspektif hukum positif, kendala yang sering ditemui adalah proses pengadilan yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagian masyarakat juga merasa kurang percaya terhadap sistem hukum formal karena adanya anggapan bahwa pengadilan tidak sepenuhnya memahami konteks sosial dan adat lokal. Kurangnya dokumen resmi yang dibutuhkan dalam proses pengadilan, seperti akta tanah atau surat waris, juga menjadi hambatan signifikan yang menghambat penyelesaian sengketa secara formal. Jadi, kendala-kendala ini menunjukkan perlunya pendekatan terpadu yang menggabungkan nilai-nilai fiqh, adat, dan hukum positif, sehingga penyelesaian sengketa waris dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan isu yang kompleks yang melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ketiga sistem hukum ini berfungsi dan saling berinteraksi dalam menyelesaikan sengketa waris yang sering kali muncul akibat ketidakpahaman atau perbedaan interpretasi mengenai hak-hak waris.

Hukum waris Islam memberikan kerangka dasar yang jelas mengenai pembagian harta warisan. Menurut Taqiyuddin, hukum waris dalam Islam mengatur hak kepemilikan harta sebagai amanat yang harus dipenuhi oleh setiap individu (Taqiyuddin, 2020). Dalam praktiknya, hukum ini sering kali dihadapkan dengan hukum adat yang juga memiliki pengaturan tersendiri mengenai warisan. Kaban menegaskan bahwa dalam masyarakat adat Karo, misalnya, tanah sebagai objek waris memiliki nilai yang lebih tinggi dan sering kali menjadi sumber sengketa (Kaban, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi lokal sangat mempengaruhi cara masyarakat menyelesaikan sengketa waris.

Kendala utama dalam penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam, meskipun memiliki panduan yang jelas, sering kali tidak diikuti secara konsisten oleh masyarakat. Hal

ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dan bagaimana penerapannya dalam konteks lokal. Sebagai contoh, Adli mencatat bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih jalur hukum adat daripada hukum positif atau pengadilan, karena mereka merasa lebih akrab dan nyaman dengan proses tersebut (Adli, 2020). Ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka di bawah hukum Islam.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, yang mencakup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa waris. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Suryanto, pelaksanaan hukum positif sering kali terhambat oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman di kalangan aparat hukum dan masyarakat (Suryanto, 2024). Hal ini menciptakan kesenjangan antara apa yang diatur oleh hukum dan praktik di lapangan. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan hak-hak mereka secara efektif.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa juga menjadi pilihan yang semakin populer. Septiani dan Edith menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, termasuk sengketa waris, dengan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa (Septiani & Edith, 2022). Namun, mereka juga mencatat adanya kendala dalam pelaksanaan mediasi, seperti ketidakcocokan antara harapan pihak-pihak yang terlibat dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan mediator yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan adat untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan lancar.

Dalam konteks Gampong Lam Bheu, pendekatan yang menggabungkan hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat mungkin menjadi solusi yang lebih efektif. Hidayat et al. menekankan pentingnya kesesuaian antara hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris, agar masyarakat dapat memilih sistem hukum yang paling sesuai dengan situasi mereka (Hidayat et al., 2018). Ini juga mencakup pengakuan formal terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yang dapat membantu mengurangi konflik dan kebingungan di antara masyarakat.

Lebih lanjut, penting untuk memperhatikan peran notaris dalam penyelesaian sengketa waris. Puspita menyoroti bahwa notaris dapat membantu dalam menyusun

perjanjian dan akta pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi potensi sengketa di masa depan (Puspita, 2022). Dengan demikian, peran notaris dalam proses ini tidak hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai mediator yang dapat membantu menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif.

Kendala lain yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang berlaku. Djanuardi et al. menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa hukum Islam, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian warisan (Djanuardi et al., 2021). Oleh karena itu, penyuluhan hukum dan pendidikan masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks waris.

Dalam menghadapi sengketa waris, masyarakat juga harus menyadari pentingnya musyawarah sebagai metode penyelesaian. Hirdayadi dan Ansar menjelaskan bahwa dalam masyarakat Aceh, musyawarah merupakan bagian integral dari proses pembagian warisan, di mana semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi dan mencapai kesepakatan yang adil (Hirdayadi & Ansar, 2018). Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai lokal, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Tantangan dalam penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu mencerminkan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang ada. Aminah mencatat bahwa pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup hukum waris adat, hukum waris BW, dan hukum waris Islam, menciptakan kerumitan yang harus dihadapi oleh masyarakat (Aminah, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih harmonis dan efektif.

Jadi, penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Dengan memahami interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, diharapkan sengketa waris dapat diselesaikan dengan lebih adil dan efektif. Upaya untuk meningkatkan pendidikan hukum dan melibatkan mediator yang kompeten juga akan sangat membantu dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk masalah ini.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar melalui perspektif fiqh mengutamakan pendekatan musyawarah dengan panduan hukum Islam (faraidh). Peran tokoh agama sangat sentral dalam memberikan solusi berbasis syariat. Namun, praktiknya sering kali dipengaruhi oleh faktor adat yang berupaya menjaga harmoni keluarga, meskipun tidak selalu selaras dengan ketentuan faraidh. Dari perspektif hukum positif, masyarakat cenderung merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pengadilan agama jika musyawarah tidak membuahkan hasil. Proses hukum formal ini menjamin keabsahan dan keadilan secara legal, tetapi sering kali dianggap rumit, memakan biaya, dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa secara informal terlebih dahulu. Kendala utama dari perspektif fiqh meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh dan inkonsistensi peran tokoh agama. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, kendalanya terletak pada kompleksitas proses pengadilan, biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan keterbatasan dokumen resmi yang diperlukan. Selain itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem hukum formal juga memperburuk situasi.

REFERENSI

- Adli, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 74. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06>
- Adnan, M., & Uyuni, B. (2021). Da'wah Strategies to Increase the Understanding of Faraidh Science in Society. *Jurnal Bina Ummat Membina dan Membentengi Ummat*, 4(2), 19–40. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i2.111>
- Ahmadin, A. (2019). Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan IPS*, 9(1), 63–69. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.209>
- Amaldi, W. (2024). Perancangan Aplikasi Perhitungan Ahli Waris dalam Islam Menggunakan Framework CI 4. *Jurnal Satya Informatika*, 9(1), 54–63. <https://doi.org/10.59134/jsk.v9i1.634>
- Aminah, S. (2021). Perspektif Hukum Islam: Peralihan Harta ke Anak Asuh dari Orang Tua Asuh. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia*, 2(2), 19–22. <https://doi.org/10.37251/jpai.v2i2.592>
- Amiruddin, M. (2022). Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 142–153. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.33523>

- Djanuardi, D., Kusmayanti, H., & Rachmainy, L. (2021). Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 408. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.34455>
- Elfia, E., Surwati, S., & Bakhtiar, B. (2023). The Struggle of Custom and Sharia: Classic Dilemma of Inheritance Settlement in Javanese and Minangkabau Ethnic Communities in Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 75. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5480>
- Fakhyadi, D. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>
- Fatahullah, F. (2023). Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Pepadu*, 4(3), 392–401. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i3.3613>
- Hadiati, M., & Tampi, M. (2017). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1). <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1908>
- Heriyah, H., & Santiago, F. (2021). Reconciliation as Problem Solution of Sharia Economic Dispute in Religious Court. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306278>
- Hidayat, A., Akbar, M., & Guntara, D. (2018). Kajian Perbandingan dalam Pembagian Waris Berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Adat. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.546>
- Hirdayadi, I., & Ansar, M. (2018). Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 237. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3114>
- Irawaty, I., & Diyantari, D. (2017). Inheritance Laws in Indonesia. *Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.05>
- Ismiradi, I. (2024). Peran Hukum Keluarga dalam Mencegah Konflik Warisan dan Mempromosikan Harmoni Keluarga. *Syntax Idea*, 6(5), 2062–2069. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>
- Kusmayanti, H. (2024). The Dynamics of Applying Both Islamic and Conventional Law in the Inheritance of Banceauy Customary Village. *Jurnal Al-Dustur*, 7(1), 26–43. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.6187>
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 8(2), 291–306. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>
- Nursyamsudin, N. (2018). Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>
- Nury, M. (2023). Peran Kyai sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 25–34. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92>
- Pratama, R. (2023). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>
- Puspita, L. (2022). Analisis Yuridis terhadap Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan. *Notarius*, 16(2), 1029–1042. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41146>
- Rafika, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Asuransi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 9(4), 1209–1222. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26601>
- Retnowulandari, W. (2022). Gender Perspective in Customary and Islamic Inheritance Law. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315073>
- Septiani, D., & Edith, R. (2022). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan melalui Proses Mediasi. *Notarius*, 15(1), 430–439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>
- Setiawan, R., Fatimah, D., & Slamet, C. (2012). Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id). *Jurnal Algoritma*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.9-1.1>
- Somawinata, Y., & Taqiyuddin, H. (2020). Hak Waris Anak Perempuan di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2013/Pdlg). *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 229. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1839>
- Suryanto, D. (2024). Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kalimantan Tengah. *Vyavahara Duta*, 19(1), 68–76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>
- Susilo, H., Junaidi, M., Rs, D., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>
- Syafrida, S. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah.” *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7(4), 353–370. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>
- Syaikhu, S. (2019). The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach. *Mazahib*, 117–141. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1441>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>
- Tedla, W., & Mekonen, K. (2023). Inheritance-Induced Familial Disputes in North-West Ethiopia: The Role of Legal-Policy Gaps and Aggravating Socio-Economic Dynamics. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01558-5>
- Wahyunadi, Z., & Azahari, R. (2015). Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 166. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>
- Zainuddin, Z., Salle, S., & Risma, A. (2023). Balanced Justice in Islamic Inheritance to Realize Unity and Sustainability of Collective Life, 66–70. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_9